



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang -undangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor :18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;



14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember baik



tahunan maupun lima tahunan.

4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER

- 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

- 1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
- 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Cipta karya disusun berdasarkan pada analisis internal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris kabupaten.

b. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember mempunyai Fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan;



2. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung;
3. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman;
4. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman; dan
5. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

- 1). Pengkoordinasian dan sinkronisasi dengan bidang dalam penyusunan program anggaran dan tugas administrasi secara terpadu;
- 2) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- 3) penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- 4). pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 5). pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 6). pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- 7). penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; dan
- 8). penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas Pokok melaksanakan ketatausahaan, kehumasan dan perlengkapan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Fungsi

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas, tata naskah, tata kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol;
- Pengurusan dan perawatan kantor dan bangunan yang menjadi tanggung jawab dinas;
- Pengevaluasian dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain yang menjadi tanggung jawab dinas;
- Pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- Persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkup Dinas;
- Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;



- Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;

- a. Tugas Pokok melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan, ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

c. Fungsi

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- penyusunan perencanaan program kegiatan dan kebutuhan anggaran kegiatan dinas;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbekalan dinas guna pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan;
- Pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Penghimpunan dan pengelolaan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
- Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;



- Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG PENGAWASAN DAN TATA BANGUNAN

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas di bidang tata bangunan gedung, pengawasan bangunan gedung dan pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

b. Fungsi

Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungannya;
- Perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung tanah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Penetapan persyaratan administrasi teknis untuk bangunan gedung;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- Pengembangan sistem informasi, penelitian, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;



- Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- Penyelenggaraan urusan pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan terdiri dari 1) Seksi Pembangunan Gedung; 2) Seksi tata Ruang dan Pertanahan; 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pembangunan Gedung;

d. Tugas Pokok melaksanakan tata bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

e. Fungsi

Seksi Pembangunan gedung mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan survey, pengukuran, pemetaan dokumentasi dan informasi bangunan serta pemantauan perkembangan bangunan dan lingkungannya;
- Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- Penyusunan dan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung dilokasi bencana serta menyusun dan menetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Penyusunan dan penetapan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan gedung negara dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;



- Pengumpulan pelaksanaan dan penganalisaan data rehabilitasi bangunan Musholla dan Masjid; dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Seksi Tata Ruang dan Pertanahan;
- a. Tugas Pokok menyiapkan urusan Penataan Ruang, Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - b. Fungsi
- Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan / perkembangan tata ruang;
 - Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - Pengumpulan bahan dan data dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
 - Pengumpulan bahan dan data untuk penetapan tanah ulayat serta penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
 - Pengumpulan bahan dan data untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
 - Pengumpulan bahan dan data untuk inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah dalam daerah; dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
- a. Tugas Pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.;



b. Fungsi

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan pedoman/peraturan pengawasan dan pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang tata cara, manfaat dan pentingnya pengendalian bangunan serta program penertiban bangunan;
- Penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem informasi, penelitian, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran gedung dan lingkungannya;
- Pengawasan dan penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau bangunan liar; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

a. Tugas Pokok

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melaksanakan Penyehatan Lingkungan Permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

b. Fungsi

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

- Penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program daerah di bidang penyehatan lingkungan;



- Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- Pelaksanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan IPLT; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari 1) Seksi Air Bersih; 2) Seksi Sanitasi; 3) Seksi Instalasi Pengelolaan air limbah. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Air Bersih;

- a. Tugas Pokok melaksanakan urusan pengelolaan lumpur tinja hasil sedotan dari septictank masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

b. Fungsi

Seksi Air Bersih mempunyai fungsi:

- Pelaksanaa survey dan informasi dalam penyediaan air bersih di daerah;
- Perencanaan, pengawasandan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana air bersih didaerah;
- Pembinaan, pengawasan, pendataan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- pendataan, pembinaan kelompok HIPPAM di daerah;dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Sanitasi ;

- a. Tugas Pokok melaksanakan melaksanakan urusan sanitasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

b. Fungsi

Seksi Sanitasi mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan survey dan informasi dalam penyediaan sanitasi di daerah;



- Perencanaan, pengawasan evaluasi, pengendalian dan pembinaan dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase;
 - Penyusunan penetapan peraturan daerah pengembangan sanitasi;
 - Pengendalian penyelenggaraan sarana prasarana air limbah domestik;
 - Perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan sanitasi; dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3) Seksi Instalasi air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah tinja perumahan dan kawasan permukiman ;
- a. Tugas Pokok melaksanakan urusan pengelolaan lumpur tinja hasil sedotan dari septictank masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- b. Fungsi
- Seksi Instalasi air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah tinja perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi:
- Pendataan pengelolaan lumpur tinja;
 - Perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT);
 - Pengelolaan melalui penyaringan (Im hooff);
 - Pengeringan lumpur tinja dan limbah (Bak Pengering);
 - Penyaringan, penjernihan air lumpur tinja dan limbah (an_aerobic);
 - Penjernihan tahap kedua (Maturasi);
 - Penyaluran Air Jernih Tinja dan limbah (Fakultatif);
 - Pelaksanaan pengurasan dan pengangkutan air kotordari Water Closet (WC) umum ke tempat IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

a. Tugas Pokok

Bidang Bidang Perumahan dan Permukiman melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukiman, perumahan, pemakaman dan penerangan jalan umum serta tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas;

b. Fungsi

Bidang Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan;
- Pelaksanaan pembinaan perumahan formal maupun perumahan swadaya;
- Pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi pelaksanaan strategi dan kebijakan tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan;
- Penyusunan penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam sistem pengembangan kawasan ;
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pengembangan kawasan ;
- Pengaturan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan permukiman dalam kawasan (kasiba dan lisiba);
- Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman kumuh;
- Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;
- Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum lainnya ; dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari 1) Pengembangan Kawasan Permukiman 2) Perumahan dan Permukiman; 3) Penerangan Jalan Umum. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;

a. Tugas Pokok melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan strategis;
- Pelaksanaan survey, dokumentasi dan pendataan permukiman yang perlu perbaikan dan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan utilitas lingkungannya;
- Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, pembangunan, perbaikan sarana prasarana dan utilitas permukiman;
- Pelaksanaan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman kumuh;
- Penyusunan rencana umum tenaga kelistrikan kawasan perdesaan serta peraturan-peraturan tentang kelistrikan desa;
- Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan listrik desa; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2). Seksi Perumahan dan Pemakaman;

a. Tugas Pokok melaksanakan pembinaan, menyusun kebijakan perumahan dan Pemakaman serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;



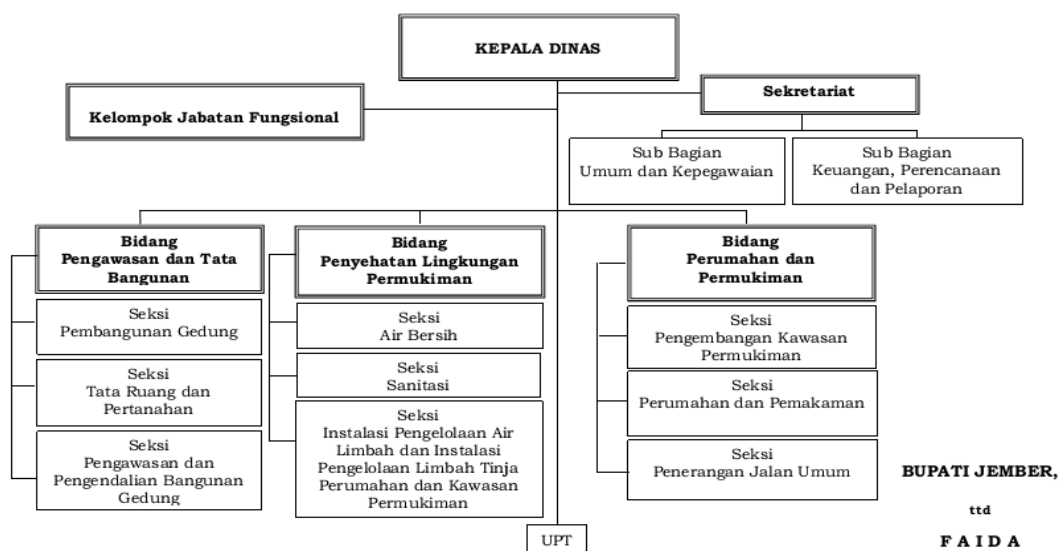
b. Fungsi

- Pengumpulan bahan informasi hasil survey, koordinasi dan konsultasi guna penyusunan kebijakan dan strategi daerah di bidang pembiayaan, pembangunan dan pendataan perumahan serta peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan;
- Pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi daerah terhadap lembaga pendukung pembangunan perumahan;
- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan sistem kawasan skala besar, kawasan khusus, keterpaduan sarana prasarana kawasan, keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang serta penyelenggaraan kasiba dan lisiba;
- Pelaksanaan survey, pemberian pertimbangan dan menyusun kajian serta rekomendasi terkait lokasi pembangunan perumahan;
- Pemberian pertimbangan dan verifikasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dari sisi kelengkapan administrasi dan teknis;
- Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan;
- Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perumahan;
- Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan;
- Perencanaan penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan perbaikan sarana dan prasarana dan utilitas pemukiman umum dan pemukiman milik daerah;
- Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi, usulan pengadaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan pemukiman umum; dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 3). Seksi Penerangan Jalan Umum;
- a. Tugas Pokok melaksanakan urusan penerangan jalan umum (PJU) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - b. Fungsi
 - perencanaan pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan lampu PJU, taman kota, lapangan olah raga dan fasilitas umum lainnya ;
 - Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan lampu PJU, taman kota, lapangan olah raga dan fasilitas umum lainnya ;
 - Perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan PJU dan lampu-lampu taman kota, lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya; dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember





2.2. Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 194 orang dengan rincian sebagai berikut.

A. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 194 orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	92
2	Non PNS	102
JUMLAH		194

B. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.



Tabel 2.2
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya
Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1
2	GOLONGAN III	27
3	GOLONGAN II	50
4	GOLONGAN I	15
JUMLAH		97

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan II, sebanyak 50 orang (54% dari seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

C. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya
Kabupaten Jember Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANA S-3	
2	PASCA SARJANA S-2	2
3	SARJANA S-1	21
4	DIPLOMA III	-



NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	51
7	SLTP	4
8	SD	13
JUMLAH		92
NON PNS		
1	SARJANA S-1	3
2	SLTA	99
3	SD	
JUMLAH		102
JUMLAH		102

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat di Kabupaten dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa Pembangunan infrastruktur, baik



Dokumen Perencanaan jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang.

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2010 s/d tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Pembangunan Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis terdahulu tertuang 5 (lima) indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terpadu dan terkoordinasi.
 - Dengan indikator : Tersedianya dokumen perencanaan secara tepat waktu yang disusun secara komprehensif dan koordinatif.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan.
 - Dengan indikator : Peningkatan efektifitas keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.



- Dengan indikator : Tersedianya dokumen rencana tata ruang serta mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif yang dapat menjamin keseimbangan perkembangan wilayah.
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- Dengan indikator : Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang antara manfaatnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungannya.
5. Tersedianya kajian sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan pembangunan daerah
- Dengan indikator : Peningkatan efektifitas pemanfaatan hasil kajian bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan secara tepat waktu yang disusun secara komprehensif dan koordinatif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase efektifitas keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Tersedianya dokumen rencana tata ruang serta mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif yang dapat menjamin keseimbangan perkembangan wilayah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
4.	Persentase Peningkatan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam yang seimbang antara manfaatnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungannya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Peningkatan efektifitas pemanfaatan hasil kajian bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan SDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environment, serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur Perencana Daerah yang responsif dan kompeten;
2. Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan Perencanaan Pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
3. Semakin tingginya animo Masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan, Ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari Masyarakat ;
4. Perencanaan ideal yang memadukan logika pembangunan sektoral dan



spasial membutuhkan peningkatan kinerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder perencanaan pembangunan lainnya.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yaitu:

a. Permasalahan Bidang Pengawasan Tata Bangunan

- Belum ada RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten) dan Peraturan Zonasi
- Belum optimalnya RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah
- Belum optimalnya perwujudan NSPK Bidang Penataan Ruang
- Belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Jember
- Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung.



b. Permasalahan bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
- Belum optimalnya pengelolaan air minum di perkotaan dan perdesaan oleh Kelompok masyarakat;
- Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
- Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat (system sewerage);
- Belum optimalnya pengelolaan layanan sanitasi di perkotaan dan Perdesaan.

c. Permasalahan Perumahan dan Permukiman

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang sehat dan layak huni;
- Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh;
- Terbatasnya Penerangan Jalan umum yang dapat memicu kerawanan kecelakaan dan tindakan criminal;
- Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana utilitas perumahan dan permukiman;
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jaringan listrik pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau jaringan PLN.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat,



Kawasan Permukiman dan Cipta karya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahunhun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh



kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan.



Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.



Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaitas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.



Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.



Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai \pm 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :



Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antar daerah ataupun antar negara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, seta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk



Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



3.3 Telaahan Renstra Menteri PU Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

3.3.1 SINKRONISASI RENSTRA MENTERI PU PERUMAHAN RAKYAT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden (Nawa Cita). Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan visi pembangunan jangka panjang, periode 2015- 2019 menjadi sangat penting karena merupakan titik kritis untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat maju lebih cepat dan bertransformasi dari kondisi saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju dengan penghasilan per kapita yang cukup tinggi. Meskipun demikian, upaya peningkatan kinerja perekonomian Indonesia perlu memperhatikan kondisi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, serta postur perekonomian yang semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK dan bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Maka dari itu, ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Salah satu tantangan pokok dalam mewujudkan visi pembangunan 2015-2019 adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur permukiman harus ditingkatkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawacita seperti membangun



Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing ekonomi. Maka dari itu, salah satu arahan kebijakan umum RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. 34 Rencana Strategis Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang seluruhnya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Adapun sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahun 2019 terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal pada hunian yang layak yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, meliputi akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen;
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia;
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional;
5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung;
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;



7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

3.3.2 SINKRONISASI RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI

Hasil review terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya provinsi Jawa Timur:

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

4.4.1. Strategi Strategi adalah cara untuk



mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.:

A. Strategi Pengembangan Perumahan

- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Pembangunan Sarana Utilitas (PSU) Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
- c. Pembangunan jalan usaha tani
- d. Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi
- e. Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
- f. Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman
- g. Renovasi gedung Negara
- h. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur permukiman

B. Strategi Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

- a. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
- b. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air
- c. Pengembangan sistem penyediaan air minum regional
- d. Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM
- e. Strategi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
- f. Pengembangan sistem pengolahan air limbah
- g. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah
- h. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- i. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase
- j. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase



- i. Pengembangan sistem pengelolaan sampah
- j. Pengembangan pengelolaan sampah regional
- k. Peningkatan kinerja pengelola sampah Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 34

C. Strategi Penataan Ruang

- a. Pengembangan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah
- b. Peningkatan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota
- c. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur

Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1) Kebijakan Pengembangan Perumahan :

- a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
- c. Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan Jawa Timur
- d. Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi dalam menghadapi AFTA 2015
- e. Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
- f. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan



permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan

- g. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- h. Renovasi gedung-gedung Negara

2) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum .

- a. Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 :
- b. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
- c. Pembangunan sapsras penyediaan air minum di daerah rawan air
- d. Melaksanakan fasilitasi SPAM Regional
- e. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
- f. Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara SPAM kategori sakit
- g. Pembinaan penyelenggaraan SPAM

3) Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

- a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
- b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
- c. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit
- d. Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
- e. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan inrastruktur permukiman
- f. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
- g. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase
- h. Pembinaan Pengelolaan Drainase
- i. Pembangunan sapsras persampahan
- j. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan sampah regional
- k. Penyusunan peraturan pengelolaan sampah
- l. Pembinaan Pengelolaan sampah



4) Kebijakan Penataan Ruang

- a. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah
- b. Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber



daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program



pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5 Isu-Isu Strategis

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- a) Pencapaian target SDG's 2030 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
- b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (SDG's) bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan

Isu strategis infrastruktur:

- Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan
- Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.



3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan



Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yaitu dibidang pembangunan infrastruktur

1. Perlunya peningkatan panjang jalan lingkungan
2. Percepatan pengembangan Bandara Notohadinegoro dengan akses jalannya
3. Perbaikan total sanitasi perkotaan
4. Pengembangan sanitasi komunal dilingkungan perumahan
5. Pengembangan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) dikabupaten Jember
6. Pembangunan rumah layak huni
7. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
8. Pembangunan PSU dilingkungan perumahan
9. Pembangunan gedung yang ramah disabilitas, lansia dan ramah ibu dan anak.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Air Minum									
1.1	Jumlah Kelompok HIPPAM Mandiri (kelompok)	143	143	154	177	200	223	248	248	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Persampahan									
2.1	Jumlah IPAL terbangun (lokasi)	18	0	0	50	50	35	35	188	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Drainase									
3.1	Panjang drainase dalam kondisi baik									
	a. Kewenangan Dinas PerumahanRakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (m)	52.459	5.788	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	b. Kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya(Drainase Permukiman) (m)	-	-	-	4.708	4.708	4.708	4.708	18.832	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
4	Bangunan Gedung									
4.1	Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah warga berkebutuhan khusus (%)	0	14,23	18,02	36,04	54,05	82	100	100% layanan publik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Penataan Bangunan dan Lingkungannya									
5.1	Persentase sarana dan prasarana publik yang ramah ibu dan anak (%)	0	0	20	40	60	80	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5.2	Jumlah pondok pesantren yang perannya ditingkatkandalam pelayanan publik dan pusat informasi per Desa/kelurahan (pondok pesantren)	Belum terdata	0	145	145	145	145	144	724	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5.3	Jumlah fasilitas keagamaan lain yang menjadi pusat informasi publik (unit)	Belum terdata	0	6	6	6	6	7	31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5.4	Jumlah Musholla dengan bangunan fisik layak (musholla)	468	0	248	248	248	248	248	1.240	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5.5	Jumlah Musholla dengan sanitasi Layak (air mengalir, drainase, tempat wudhu, MCK) (musholla)	Belum terdata	0	248	248	248	248	248	1.240	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
5.6	Jumlah Musholla dengan fasilitas pendukung lainnya layak (speaker, alquran, papan tulis, karpet, papan nama, papan informasi) (musholla)	Belum terdata	0	248	248	248	248	248	1.240	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5.7	Jumlah kantor Ta'mir Masjid yang dibedah (masjid)	Belum terdata	0	100	100	100	100	96	496	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6	Penataan Ruang									
6.1	Persentase peruntukan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember (%)	90	95	95	95	95	95	95	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6.2	Persentase pelanggaran terhadap Perda RTRW (%)	10	10	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6.3	Jumlah kawasan PKL yang ditata (kawasan)	4	4	6	8	10	12	14	14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh									
1.1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	47,2	47,2	40	30	20	10	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.2	Jumlah Perbaikan Rumah Kurang Layak Huni (PRKLH) (unit)	53.507	0	392	11.195	11.197	11.197	11.197	98.685	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)									
2.1	Jumlah KK Bersanitasi Baik									Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	a. Jumlah KK dengan air bersih (KK)	382.258	392.548	393.808	411.942	430.142	448.342	466.542	466.542	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	b. Jumlah KK pelayanan jamban keluarga (KK)	315.509	120	392	1.713	1.713	2.000	2.000	323.447	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
2.2	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses Listrik	85	85	90	90	95	95	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.3	Jumlah Titik Lampu PJU terpelihara dengan baik (Titik Lampu)	22.675	7.000	7.000	7.300	7.600	8.200	8.500	45.600	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.4	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik (m2)	103.250	40.758	57.203	113.555	130.000	130.000	130.000	704.766	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



3. Pertanahan

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Sengketa Tanah Garapan									
1.1	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	40	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

LAMPIRAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	8
2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER.....	9
2.2. SUMBERDAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER.....	23
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER	25
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	29
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER	29



3.2.	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	30
3.3.	TELAAHAN RENSTRA MENTERI PU PERUMAHAN RAKYAT, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	40
3.3.1	SINKRONISASI RENSTRA MENTERI PU PERUMAHAN RAKYAT.....	40
3.3.2	SINKRONISASI RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI.....	42
3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	46
3.5.	ISU-ISU STRATEGIS.....	48
3.6.	PENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	50
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	48
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	54

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntable serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember pada setiap tahunnya.

Jember, 26 Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

YESSIANA ARIFA, ST, M.Eng

Penata Tk.I

NIP . 19771006 200212 2 004

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Meningkanya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	70	70	72	74	76	78	80	80	Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu	1. Menyusun rencana tata ruang sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang 2. Menyusun penggunaan lahan sesuai peruntukan dan perda RTRW 3. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan dan pengawasan lapangan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Program Pemanfaatan Ruang Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran			
2	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	indeks layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah	65	65	66	67	68	69	70	70	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	1. Fasilitasi dan stimulasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala	Program Pengembangan Perumahan	
				2. Persentase rumah layak huni	50	50	51	52	53	54	55	55	Peningkatan rehabilitasi Rumah tidak layak huni	Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tertentu	
														Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh air bersih yang layak	1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih 2. Membangun infrastruktur air bersih pada masyarakat perdesaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
														Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak	Mebangun infrastruktur sanitasi pada kawasan rawan sanitasi dan kumuh perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
													Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	Membangun akses jalan lingkungan permukiman	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Lingkungan Permukiman
															Program Pembangunan Jalan dan jembatan di lingkungan permukiman
															Program Pengelolaan Areal Pemakaman
													Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan jalan umum	Meningkatkan pembangunan Penerangan jalan umum	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum
															Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan
				3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh	47,2	47,2	40,2	30,2	20,2	10,2	0	0	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	Membanguna sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Perumahan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran			
															Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan Tertentu

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni	1.03.1.03.0 2.41	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air Bersih	Jumlah KK dengan Air Bersih	382.258 KK	392.548 KK	393.808 KK	4.505.925.000	411.942 KK	9.676.005.000	430.142 KK	3.515.029.682	448.342 KK	4.189.997.912	466.542 KK	5.064.244.264	466.542 KK	DINAS PERUMAHAN	Kab Jember	
			1.03.1.03.0 2.41.01	Pengembangan Sistem distribusi air minum	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	0	0	0	19 lokasi (APBN) 5 lokasi (APBDII)	1.435.290.000	16 lokasi (APBN) 9 lokasi (APBDII)	330.425.000	30 lokasi	1.600.000.000	30 lokasi	1.600.000.000	30 lokasi	1.600.000.000	139 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.41.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	382.258 KK (81,93%)	0	0	0 KK	121.000.000	9 lokasi (DAK)	3.057.615.000	30 lokasi	23.100.000.000	30 lokasi	23.100.000.000	30 lokasi	23.100.000.000	99 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.41.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	0	0	0	13 lokasi	2.812.410.000	21 lokasi	6.219.900.000	30 lokasi	2.500.000.000	30 lokasi	2.500.000.000	30 lokasi	2.500.000.000	124 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.41.04	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah kelompok HIPPAM yang dibina	143 Kelompok	143 Kelompok	0	154 Kelompok	137.225.000	177 Kelompok	68.065.000	200 Kelompok	200.000.000	223 Kelompok	150.000.000	248 Kelompok	150.000.000	248 Kelompok	248 Kelompok	
			1.03.1.03.0 2.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	382.258 KK (81,93%)	10.290 kk (49 lokasi)	12.278.977.100													
			1.03.1.03.0 2.01.27.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah IPAL yang terbangun	18 lokasi	0 lokasi	236.693.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.03.1.03.0 2.01.27.06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 81,77%		1 Tahun	2.586.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.03.1.03.0 2.01.27.10	Pembangunan MCK	Jumlah MCK yang terbangun	79 lokasi	6 lokasi	777.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.03.1.03.0 2.01.27.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah KK yg terlayani Air Bersih	382.258 KK (81,93%)	10.290 kk (49 lokasi)	11.262.427.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.03.1.03.0 2.42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses sanitasi	60%	0	0	73%	8.713.250.000	80%	8.647.682.500	87%	833.393.879	93%	993.425.072	100%	1.200.703.992	100%	Bid. Penyehatan Lingkungan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
					Jumlah KK mendapatkan Pelayanan Jamban Keluarga	315.509 KK	0 Unit		392 KK	1.713 KK		1.713 KK		2.000 KK		2.000 KK		323.447 KK			
					Jumlah IPAL terbangun	18 lokasi				50 lokasi		50 lokasi		35 lokasi		35 lokasi		188 lokasi			
			1.03.1.03.0 2.42.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah IPAL yang terbangun	18 lokasi	0	0	1 dok	110.000.000	3 lokasi	465.987.500	50 lokasi	15.000.000.000	65 lokasi	21.500.000.000	70 lokasi	21.500.000.000	188 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.42.02	Pembangunan MCK	Jumlah MCK yang terbangun	85 lokasi	0	0	25 lokasi	2.801.800.000	40 lokasi	3.852.300.000	40 lokasi	5.000.000.000	40 lokasi	5.000.000.000	40 lokasi	5.000.000.000	270 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.42.03	Pembangunan Jamban	Jumlah Jamban yang terbangun	315.509 Unit	0 Unit	0	392 unit	5.610.950.000	319 unit	4.062.195.000	500 unit	3.000.000.000	500 unit	3.000.000.000	500 unit	3.000.000.000	317.720 unit		
			1.03.1.03.0 2.42.04	Pembuatan Sanimas	Jumlah sanimas yang terbangun	4 lokasi	0	0	0	0	0	10 lokasi	4.000.000.000	10 lokasi	4.000.000.000	0	0	0	24 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.42.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monev sanimas	2 dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	0	0	0	2 dokumen		
			1.03.1.03.0 2.42.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPAL dan IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara	0	0	0	1 lokasi	190.500.000	1 lokasi	267.200.000	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1.08.1.03.0 2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK yang terlayani	0 unit	0 unit	3.297.414.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPU	LAMA	Kab Jember	
			1.08.1.03.0 2.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peningkatan ketersediaan TPST 3R dan bank sampah			646.612.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1.08.1.03.0 2.15.13	Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah	Jumlah regulasi persampahan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1.08.1.03.0 2.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Petugas Kebersihan dalam pelayanan sampah	605 orang	605 orang	2.650.802.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1.08.1.03.0 2.15.06	Bimbingan Teknis Persampahan																	
			1.04.1.03.0 2.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase wilayah dusun yang memperoleh aliran listrik	85%	85%	0	90%	138.660.000	90%	369.570.172	95%	428.310.316	95%	510.555.954	100%	617.083.854	100%	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.23.01	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah dusun yang dipantau ketersediaan listriknya	12	0	0	1	0	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	61		
			1.04.1.03.0 2.23.02	Pengembangan Dan Pemeliharaan Kelistrikan	Jumlah paket pengembangan dan pemeliharaan jaringan lisdes	1 lokasi	1 paket	800.000.000	0	138.660.000	3 lokasi/ 211 kk	1.588.000.000	4 lokasi/ 150 kk	2.158.800.000	3 lokasi/ 150 kk	615.880.000	3 lokasi/ 150 kk	461.588.000	13 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.23.03	Pengembangan Energi Terbarukan/ Alternatif	Jumlah energi terbarukan/alternatif yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi PLTS				1 lokasi PLTS								3 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.43	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang berfungsi baik	24.193 Titik Lampu	0	0	523 Titik Lampu	8.669.020.000	2.000 Titik Lampu	9.067.002.501	1.977 Titik Lampu	10.508.128.103	1.500 Titik Lampu	12.525.935.424	1.500 Titik Lampu	15.139.481.677	31.693 Titik Lampu	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
					Jumlah titik PJU yang terbangun	23.368 Titik Lampu	0	0	523 Titik Lampu		2.000 Titik Lampu		1.977 Titik Lampu		1.240 Titik Lampu		1.500 Titik Lampu		30.608 Titik Lampu		
					Jumlah titik PJU yang terbangun menuju bandara	30 Titik Lampu	0	0	0		0		0		60 Titik Lampu		0		90 Titik Lampu		
					Jumlah titik PJU yang terbangun menuju ke destinasi wisata	795 Titik Lampu	0	0	0		0		0		200 Titik Lampu		0		200 Titik Lampu		
					Jumlah Titik Lampu PJU terpelihara dengan baik	22.675 Titik Lampu	7.000 Titik Lampu	0	7.000 Titik Lampu		7.300 Titik Lampu		7.600 Titik Lampu		8.200 Titik Lampu		8.500 Titik Lampu		45.600 Titik Lampu		
			1.03.1.03.0 2.43.01	Peningkatan/ Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah titik PJU yang terbangun	23.368 Titik Lampu	0	0	523 Titik Lampu	4.304.000.000	2.000 Titik Lampu	16.200.000.000	1.977 Titik Lampu	17.000.000.000	1.240 Titik Lampu	19.800.000.000	1.500 Titik Lampu	20.000.000.000	30.608 Titik Lampu		
					Jumlah titik PJU yang terbangun menuju bandara	30 Titik Lampu	0	0	0	0	0	0	0	0	60 Titik Lampu	600.000.000	0	0	90 Titik Lampu		
					Jumlah titik PJU yang terbangun menuju ke destinasi wisata	795 Titik Lampu	0	0	0	0	0	0	0	0	200 Titik Lampu	2.000.000.000	0	0	200 Titik Lampu		
			1.03.1.03.0 2.43.02	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Titik Lampu PJU terpelihara dengan baik	22.675 Titik Lampu	7.000 Titik Lampu	0	7.000 Titik Lampu	4.365.020.000	7.300 Titik Lampu	4.200.000.000	7.600 Titik Lampu	4.500.000.000	8.200 Titik Lampu	4.700.000.000	8.500 Titik Lampu	5.000.000.000	45.600 Titik Lampu		
			1.03.1.03.0 2.43.03	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Hias	Jumlah lampu hias yang terpasang		0	0	0	0	1 Paket	400.000.000	1 Paket	550.000.000	1 Paket	650.000.000	1 Paket	750.000.000	4 Paket		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1.04.1.03.0 2.21	Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan tertentu	Luas kawasan kumuh (ha)	47,2 ha	47,2 ha	0	40 ha	4.621.080.000	30 ha	8.502.474.500	20 ha	677.850.324	10 ha	808.013.502	0 ha	976.606.153	0 ha	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.21.01	Pembangunan dan peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan kumuh/tertentu	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	47,2 ha	47,2 ha	0	40 ha	298.450.000	30 ha	628.212.500	20 ha	3.000.000.000	10 ha	2.000.000.000	0 ha	0	0 ha		
			1.04.1.03.0 2.21.02	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH tertangani	53.507 unit	0 Unit	0	392 unit	2.537.250.000	464 unit	6.063.882.000	500 unit	10.000.000.000	700 unit	10.000.000.000	900 unit	10.000.000.000	56.496 unit		
			1.04.1.03.0 2.21.03	Pembangunan rusunawa	Rekomendasi pembangunan rusunawa	20 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	5.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	0	0	2 unit		
			1.04.1.03.0 2.21.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (P2KKP)																	
			1.04.1.03.0 2.21.05	Pemeliharaan Trotoar	Panjang trotoar yg terpelihara	Belum terdata			49,64 km	1.785.380.000	49,64 km	1.810.380.000							49,64 km		
			1.03.1.03.0 2.38	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lingkungan	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	103.250 m ²	0	0	57.203 m ²	58.514.457.500	113.555 m ²	12.624.780.338	130.000 m ²	14.631.385.516	130.000 m ²	17.440.955.073	130.000 m ²	21.080.024.031	704.766 m ²	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.03.1.03.0 2.38.01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Luas jalan lingkungan yang dibangun	103.250 m ²	40.758 m ²	0	57.203 m ²	58.397.962.500	113.555 m ²	30.000.000.000	130.000 m ²	30.000.000.000	130.000 m ²	30.000.000.000	130.000 m ²	30.000.000.000	704.766 m ²		
			1.03.1.03.0 2.38.02	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Lingkungan Permukiman	0																
			1.03.1.03.0 2.38.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monev kegiatan hibah	0	0	1 dokumen	116.495.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	6 dokumen			
			1.03.1.03.0 2.39	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Lingkungan Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang terpelihara	1.470 m ²	0	0	1.200 m ²	100.000.000	1.500 m ²	107.714.050	1.500 m ²	124.834.314	1.500 m ²	148.805.433	1.500 m ²	179.853.804	8.400 m ²	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.03.1.03.0 2.39.01	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Luas jalan lingkungan yang terpelihara	1.470 m ²	1.200 m ²	0	1.200 m ²	100.000.000	1.500 m ²	250.000.000	1.500 m ²	250.000.000	1.500 m ²	250.000.000	1.500 m ²	250.000.000	8.400 m ²		
			1.03.1.03.0 2.39.02	Pemeliharaan Jembatan di Lingkungan Permukiman																	
			1.03.1.03.0 2.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya infrastruktur yang lebih baik	3 lokasi	0 lokasi	0	4 lokasi	0	10 lokasi	452.399.010	6 lokasi	524.304.118	5 lokasi	589.759.399	5 lokasi	677.115.648	33 lokasi	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.03.1.03.0 2.30.01	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah lingkungan permukiman yang tertata	3 lokasi	0 lokasi	0	4 lokasi	0	10 lokasi	750.000.000	6 lokasi	750.000.000	5 lokasi	750.000.000	5 lokasi	750.000.000	33 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.30.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1.03.1.03.0 2.49	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Lingkungan Permukiman	Panjang saluran drainase permukiman berfungsi baik	Belum Terdata	0	0	0	0	4.708 m ²	369.570.172	4.708 m ²	428.310.316	4.708 m ²	510.555.954	4.708 m ²	617.083.854	18.832 m ²	Bid. Penyehatan Lingkungan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.03.1.03.0 2.49.01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Lingkungan Permukiman	Panjang drainase permukiman yang terbangun	Belum Terdata	0	0	0	0	510 m	538.430.000	4.708 m ²	3.691.125.000	4.708 m ²	3.691.125.000	4.708 m ²	3.691.125.000	18.832 m ²		
			1.03.1.03.0 2.49.02	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Lingkungan Permukiman	Panjang drainase permukiman yang terpelihara																
			1.03.1.03.0 2.34	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar	Persentase saluran drainase dan trotoar berfungsi baik	32.942 m	75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPU LAMA	Kab Jember
			1.04.1.03.0 2.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Makam yang bersih dan indah	8 lokasi	8 lokasi	540.613.000	8 lokasi	688.750.000	8 lokasi	538.570.250	8 lokasi	624.171.569	8 lokasi	702.094.523	8 lokasi	806.090.057	8 lokasi	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.20.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah makam yang terbangun	8 lokasi	0	0	0	0	5 lokasi	500.000.000	5 lokasi	500.000.000	5 lokasi	500.000.000	5 lokasi	500.000.000	28 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.20.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah makam yang terpelihara	8 lokasi	8 lokasi	540.613.000	8 lokasi	688.750.000	8 lokasi	600.000.000	8 lokasi	500.000.000	8 lokasi	500.000.000	8 lokasi	500.000.000	8 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.20.09	Pembuatan data base makam kabupaten jember	Dokumen data pemakaman	0	0	0	0	0	1 dokumen	150.000.000	2 dokumen	100.000.000	0	0	0	0	3 dokumen		
			1.04.1.03.0 2.22	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang berfungsi baik	5 lokasi	0	0	4 lokasi	373.000.000	2 lokasi	161.571.075	3 lokasi	187.251.471	3 lokasi	210.628.357	3 lokasi	241.827.017	15 lokasi	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.22.01	Pendataan PSU perumahan	Jumlah Perumahan yang terdata		0	0	0	0	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	0	0	2 dokumen		
			1.04.1.03.0 2.22.02	Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan	Jumlah Kawasan Perumahan Yang Terbangun	5 lokasi	0	0	0	0	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	25 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.22.03	Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan	Jumlah Kawasan Perumahan yang terpelihara		0	0	4 lokasi	373.000.000	2 lokasi	300.000.000	3 lokasi	450.000.000	3 lokasi	500.000.000	3 lokasi	600.000.000	15 lokasi		
			1.03.1.03.0 2.48	Program Peningkatan Sarana Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren	Jumlah pondok pesantren yang perannya ditingkatkan dalam pelayanan publik dan pusat informasi per Desa/kelurahan	Belum Terdata	0	0	145	439.460.700	145	1.762.711.800	145	128.493.000	145	153.167.000	144	185.125.000	724	Bid. Pngwsn dan TT Bngunan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
					Jumlah fasilitas keagamaan lain yang menjadi pusat informasi publik (unit)	Belum Terdata	0	0	6		6		6		6		7		31		
					Jumlah Musholla dengan bangunan fisik layak (musholla)	468	0	0	248		248		248		248		248		1.240		
					Jumlah Musholla dengan sanitasi Layak (air mengalir, drainase, tempat wudhu, MCK) (musholla)	Belum Terdata	0	0	248		248		248		248		248		1.240		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Jumlah Musholla dengan fasilitas pendukung lainnya layak (speaker, alquran, papan tulis, karpet, papan nama, papan informasi) (musholla)	Belum Terdata	0		248		248		248		248		248	1.240			
					Jumlah kantor Ta'mir Masjid yang dibedah (masjid)	Belum Terdata	0		100		100		100		100		96	496			
			1.03.1.03.0 2.48.01	Fasilitas Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Pesantren	Jumlah dokumen Pembangunan/rehabilitasi Pondok Pesantren	Belum Terdata	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0			
			1.03.1.03.0 2.48.02	Fasilitas Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Ibadah	Jumlah dokumen Pembangunan/rehabilitasi Tempat Ibadah	Belum Terdata	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0			
			1.03.1.03.0 2.48.03	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah	Belum Terdata	0	1 unit	439.460.700	50 unit	1.762.711.800	100 unit		100 unit		100 unit		351 unit			
			1.03.1.03.0 2.48.04	Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Pesantren	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi pondok pesantren	Belum Terdata	0	0		0		0		0		0		0			
		Persentase KK yang memiliki rumah	1.04.1.03.0 2.15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah aset PSU	0	3 kwsn	0	3 kwsn	164.250.000	3 kwsn	161.571.075	3 kwsn	187.251.471	3 kwsn	210.628.357	3 kwsn	241.827.017	18 kwsn	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.15.03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah kawasan perumahan yang sudah menyerahkan Fasum/Fasos	0	3 kwsn	0	3 kwsn	164.250.000	3 kwsn	250.000.000	3 kwsn	300.000.000	3 kwsn	300.000.000	3 kwsn	400.000.000	18 kwsn		
			1.04.1.03.0 2.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen money dan Pelaporan	0	0	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	4 dokumen		
		Luasan Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.1.03.0 2.22	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang berfungsi baik	5 lokasi	0	0	4 lokasi	373.000.000	2 lokasi	161.571.075	3 lokasi	187.251.471	3 lokasi	210.628.357	3 lokasi	241.827.017	15 lokasi	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.22.01	Pendataan PSU perumahan	Jumlah Perumahan yang terdata		0	0	0	0	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	0	0	2 dokumen		
			1.04.1.03.0 2.22.02	Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan	Jumlah Kawasan Perumahan Yang Terbangun	5 lokasi	0	0	0	0	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	5 lokasi	5.000.000.000	25 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.22.03	Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan	Jumlah Kawasan Perumahan yang terpelihara		0	0	4 lokasi	373.000.000	2 lokasi	300.000.000	3 lokasi	450.000.000	3 lokasi	500.000.000	3 lokasi	600.000.000	15 lokasi		
			1.04.1.03.0 2.21	Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Kawasan tertentu	Luas kawasan kumuh (ha)	47,2 ha	47,2 ha	0	40 ha	4.621.080.000	30 ha	8.502.474.500	20 ha	677.850.324	10 ha	808.013.502	0 ha	976.606.153	0 ha	Bid. Perumahan dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.04.1.03.0 2.21.01	Pembangunan dan peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan kumuh/tertentu	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	47,2 ha	47,2 ha	0	40 ha	298.450.000	30 ha	628.212.500	20 ha	3.000.000.000	10 ha	2.000.000.000	0 ha	0	0 ha		
			1.04.1.03.0 2.21.02	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH tertangani	53.507 unit	0 Unit	0	392 unit	2.537.250.000	464 unit	6.063.882.000	500 unit	10.000.000.000	700 unit	10.000.000.000	900 unit	10.000.000.000	2.956 unit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										TARGET AKHIR RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2021	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1.04.1.03.0 2.21.03	Pembangunan rusunawa	Rekomendasi pembangunan rusunawa	20 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	5.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	0	0	2 unit		
			1.04.1.03.0 2.21.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (P2KKP)																	
			1.04.1.03.0 2.21.05	Pemeliharaan Trotoar	Panjang trotoar yg terpelihara	Belum terdata			49,64 km	1.785.380.000	49,64 km	1.810.380.000							49,64 km		
Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Meningkanya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	1.03.1.03.0 2.44	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah regulasi pengendalian pemanfaatan ruang	0	0	0	0	0	1 dok	184.785.086	0	214.155.158	0	255.277.977	1 dok	308.541.927	2 dokumen	Bid. Pngwsn dan TT Bngunan	
			1.03.1.03.0 2.44.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen RDTRK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.03.1.03.0 2.44.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen RTBL	0	0	0	0	0	1 dok (Kwsn Bandara dan JSG)	250.000.000	0	0	0	0	1 dok (Kwsn segitiga emas)	250.000.000	2 dokumen		
			1.03.1.03.0 2.45	Program Pemanfaatan Ruang	Luas lahan yang dibebaskan untuk layanan publik					6.266.039.000	1 ha	1.108.710.516	1 ha	1.284.930.949	1 ha	1.531.667.861	1 ha	1.851.251.562	4 ha	Bid. Pngwsn dan TT Bngunan	
			1.03.1.03.0 2.45.03	Penyusunan Kebijakan Pengendalian		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.03.1.03.0 2.45.04	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Ruang				1 lokasi	214.620.000											
			1.03.1.03.0 2.45.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.03.1.03.0 2.45.10	Fasilitasi Sarana PK 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.03.1.03.4 5.14	Perencanaan RTH di Kecamatan se-Kabupaten Jember	Jumlah perencanaan RTH yg diselesaikan	Belum terdata			31 lokasi	1.627.500.000	25 lokasi	1.320.820.000							31 lokasi		
			1.01 . 1.03.2 . 17	Program Pendidikan Menengah			0	0	1 ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bid. Pngwsn dan TT Bngunan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
			1.01 . 1.03.2 . 17.73	Pengadaan Tanah	Meningkatnya Aset Tanah		0	0	1 ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.03.1.03.0 2.46	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan (%)	90%	90%	136.128.000	95%	500.000.000	95%	538.570.250	95%	624.171.569	95%	744.027.166	95%	899.269.018	95%	Bid. Pngwsn dan TT Bngunan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
					Persentase Pelanggaran terhadap Perda RTRW (%)	10%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		
			1.03.1.03.0 2.46.03	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang																	
			1.03.1.03.0 2.46.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi bangunan gedung yang terbit IMB	12,35% (41.713 IMB)	13,48% (500 IMB)	136.128.000	13,48% (500 IMB)	500.000.000	41,61% (500 IMB)	500.000.000	15,74% (500 IMB)	500.000.000	16,87% (500 IMB)	500.000.000	18% (500 IMB)	500.000.000	18% (44.213 IMB)		
			1.03.1.03.0 2.46.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.03.1.03.0 2.46.09	Pengawasan dan Penertiban IMB dan Reklame	Persentase Pelanggaran terhadap Perda RTRW (%)	10%	10%	0	5%	0	5%	350.000.000	5%	350.000.000	5%	350.000.000	5%	350.000.000	5%		

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.1.03.02.07	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operassional SKPD	100%	100%	50.308.679.310	100%	63.534.637.504	100%	58.137.729.450	100%	67.378.244.202	100%	72.708.186.069	100%	80.574.214.061	100%	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat/ paket/data dll yang dikirim	1.488 surat	12 bulan	1.200.000	12 bulan	9.100.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.800.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan		
1.03.1.03.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1	12 bulan	48.936.824.810	12 bulan	62.305.700.004	12 bulan	55.340.000.000	12 bulan	56.340.000.000	12 bulan	57.340.000.000	12 bulan	58.340.000.000	12 bulan		
1.03.1.03.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Servis komputer & printer	komputer 40, printer 35	10.371.000	komputer 40, printer 35	46.250.000	komputer 40, printer 35	11.750.000	komputer 40, printer 35	12.000.000	komputer 40, printer 35	12.250.000	komputer 40, printer 35	12.750.000	komputer 40, printer 35		
1.03.1.03.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	0	1 Paket	52.872.600	1 Paket	55.097.000	1 Paket	56.000.000	1 Paket	57.500.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	58.750.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	0	1 Paket	26.062.300	1 Paket	26.596.500	1 Paket	27.000.000	1 Paket	27.500.000	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.250.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	0	1 Paket	22.077.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	27.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	1 Paket	504.249.000	1 Paket	306.500.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	355.000.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengadaan buku/literatur/bahan bacaan dan peraturan per-UUan	0	1 Paket	2.020.000	1 Paket	5.124.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	0	1 Paket	95.040.000	1 Paket	128.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	160.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	0	12 bulan	27.987.500	12 bulan	29.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan		
1.03.1.03.02.01.19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Jumlah pembayaran honorarium tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	0	5 Orang rollstad	65.424.000	5 Orang rollstad	4.000.000	5 Orang rollstad	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan		
1.03.1.03.02.01.20	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0		
1.03.1.03.02.01.22	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan kebersihan	0	1 Paket	23.981.100	1 Paket	25.000.000	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.500.000	1 Paket	29.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.01.26	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Jumlah pengembangan program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.1.03.02.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/ Kedinasan	Jumlah Pembayaran Honorarium Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	0	12 bulan	540.570.000	12 bulan	569.270.000	12 bulan	558.000.000	12 bulan	558.500.000	12 bulan	559.000.000	12 bulan	560.000.000	12 bulan		
1.03.1.03.02.01.30	Pelayanan Kepegawaian Elektronik	Sistem kepegawaian secara elektronik	0	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.1.03.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	80%	82%	6.681.397.800	82%	2.638.060.000	84%	1.211.309.121	86%	1.403.836.760	88%	1.514.886.972	90%	1.678.776.954	90%	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit/ luas gedung kantor yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli	0	0	0	0	1.400.000.000	Mobil tangga Hydraulic 1 unit, Sepeda motor trail 10 unit, Fukuda 1 unit, Truck Tangki 1 unit.	1.890.000.000	Mobil tangga Hydraulic 1 unit, Sepeda motor 5 unit.	1.125.000.000	Sepeda Motor 5 Unit	125.000.000	Mobil Pickup dan Station	500.000.000	Mobil tangga Hydraulic 2 unit, Sepeda motor trail 20 unit, Fukuda 1 unit, Truck Tangki 1 unit, mobil pickup dan station		
1.03.1.03.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis meubelair yang dibeli	0	1 Paket	196.240.000	0	0	0	0	1 Paket	200.000.000	0	0	1 Paket	200.000.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.02.12	Pengadaan Tempat Parkir dan Pos Penjagaan	Luas tempat parkir dan pos penjagaan yang dibangun	0	0	0	0	0	1 unit	190.000.000	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.13	Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor	Luas bangunan paving dan panjang bangunan pagar kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.14	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	Jumlah dan jenis alat kantor, alat rumah tangga dan komputer yang dibeli	0	Komputer/ PC 6 Unit, Printer 8 Unit, UPS	154.363.000	0	0	printer 6 unit, laptop 2 unit	50.000.000	printer 6 unit, laptop 2 unit	200.000.000	0	0	printer 6 unit,	200.000.000			
1.03.1.03.02.02.15	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin	Jumlah unit alat bengkel bermesin/ tidak bermesin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.18	Pengadaan/ Pembangunan Taman	Jumlah taman kantor yang dibangun	2 lokasi	1 lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.19	Pengadaan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terbangun	0	0	0	0	0	1 unit tandon air	75.000.000	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan secara rutin/berkala	0	0	0	0	93.500.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan		
1.03.1.03.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	0	1 Unit	45.894.800	1 Unit	65.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	85.000.000	1 Unit		
1.03.1.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Kendaraan, 159 unit per tahun	159 unit per tahun	5.122.393.000	47 unit per tahun	1.004.560.000	63 unit per tahun	1.474.400.000	69 unit per tahun	1.675.650.000	74 unit per tahun	1.735.450.000	76 unit per tahun	1.804.450.000	76 unit per tahun		
1.03.1.03.02.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Jumlah Unit pemeliharaan taman yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2 lokasi	3 Lokasi	127.567.000	3 Lokasi	75.000.000	3 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	110.000.000	3 Lokasi	115.000.000	3 Lokasi	120.000.000	3 Lokasi		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.1.03.02.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin	Jumlah peralatan terpelihara	0	1 Paket	147.070.000	1 Paket		1 Paket	16.600.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	24.150.000	1 Paket	24.150.000	1 Paket		
1.03.1.03.02.02.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Jumlah tanaman terpelihara	0	12 Bulan	195.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.1.03.02.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	0	1 Unit	692.730.000	0	0	1 unit	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.1.03.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase tingkat disiplin aparatur	0	1	83.490.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga /Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	0	560 stel	83.490.000	560 stel	0	200 stel	40.000.000	200 stel	40.000.000	200 stel	40.000.000	200 stel	40.000.000			
1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta sosialisasi yang paham	100%	100%	0	0	0	100%	73.914.034	100%	85.662.063	100%	92.438.343	2 kegiatan	102.438.903	2 kegiatan	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.05.03	Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang akan melaksanakan bimtek dan peserta sosialisasi	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	0	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan		
1.03.1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	80%	80%	42.716.000	80%	80.000.000	80%	86.171.240	80%	99.867.451	80%	107.767.445	80%	119.426.404	80%	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan	0%	1 dokumen	18.088.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	7 dokumen		
1.03.1.03.02.06.05	Penyusunan RKA dan RAPBD II SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan	0%	2 dokumen	15.883.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	12 dokumen		
1.03.1.03.02.06.06	Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan	0%	2 dokumen	8.745.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	12 dokumen		
1.03.1.03.02.06.09	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD	Jumlah dokumen yang diselesaikan	0%	1 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	7 dokumen		
1.03.1.03.02.07	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	0	0	0	B	0	B	107.714.050	B	124.834.314	B	134.709.306	B	149.283.004		Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.07.01	Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	0	0	0	B	0	B	107.714.050	B	124.834.314	B	134.709.306	B	149.283.004			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.1.03.02.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan	80%	80%	16.950.000	80%	30.000.000	80%	32.314.215	80%	37.450.294	80%	40.412.792	80%	44.784.901	80%	Sekretariat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
1.03.1.03.02.08.01	Training Manajemen		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.1.03.02.08.06	Penyusunan Renstra, RKP, Dan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen renstra dan dokumen perencanaan lainnya	0%	1 dokumen	16.950.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	7 dokumen		